

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Profil Singkat Detik.com

1.1 Sejarah Detik.com

Detik.com merupakan salah satu portal media daring pertama di Indonesia, yaitu bisa diakses mulai 9 Juli 1998. Portal media online yang didirikan oleh 4 orang yaitu Budiono Darsono, Abdul Rahman, Didi Nugrahadi dan Yayan Sopyan pada bulan Oktober 1995 dan disahkan pada bulan Januari 1996 dibawah nama PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom). Mulai pada tanggal 3 Agustus 2011 bergabung dengan PT Trans Corp di bawah kepemimpinan Chairul Tanjung (CT Corp). Dengan bergabungnya detik.com dengan CT Corp tersebut, jajaran direksi detik.com diisi oleh pihak dari CT Corp.

Dari keempat orang tersebut tiga diantaranya adalah mantan wartawan senior di Indonesia yaitu Budiono Darsono, Abdul Rahman dan Yayan Sopyan sedangkan Didi Nugrahadi merupakan seorang professional dari Bank Exim. Budi Darsono merupakan wartawan di Surabaya Post, Tempo, Berita Buana, SWA-sembada, majalah Prospek, tabloid Detik dan SCTV. Abdul Rahman berawal dari Tempo, SWA-sembada, Berita Buana dan majalah Prospek. Sedangkan Yayan Sopyan ketika mahasiswa mengelola pers kampus di Balairung, kampus Bulaksumur Universitas Gajah Mada Yogyakarta, wartawan di tabloid Detik. Namun kemudian pada tahun 2002,

Yayan Sopyan dan Didi Nugrahadi mengundurkan diri. Beberapa waktu kemudian, Calvin Lukmantara, yang merupakan pengusaha internet, bergabung dalam perusahaan tersebut. Sejak mulai bisa diakses secara online pada tanggal 9 Juli 1998, maka ditetapkan sebagai hari lahir Detik.com.

Pada awalnya, peliputan terfokus pada berita politik, ekonomi dan teknologi informasi. Setelah kondisi perpolitikan di Indonesia mulai reda dan ekonomi membaik maka Detik.com memasukkan berita hiburan dan olahraga dalam peliputannya. Dengan kondisi tersebut, muncul dorongan untuk membangun detik.com untuk tidak langi menggunakan karakteristik media cetak dengan terbit harian, mingguan ataupun bulanan tetapi dengan menjual berita secara aktual di waktu yang bersamaan dengan terjadinya berita atau dikenal dengan *breaking news*.

Berita pertama yang terbit pada tanggal 9 Juli 1998 adalah tentang Munas Golkar yang ditulis oleh Budiono Darsono. Pada saat itu, tag di bagian atas Detik.com masih bertuliskan "*The Tick Com*" tapi pada alamat domainnya menggunakan www.detik.com dengan mencantumkan slogan "Karena di bawah kepala ada otak, stop asal njeplak". Pada bulan Juli 1998 tersebut, situs detik.com menerima 30.000 hits (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) per harinya dengan sekitar 2.500 pengguna. Sembilan bulan kemudian, yaitu pada Maret 1999, hits per hari meningkat tujuh kali lipat yaitu rata-rata 214.000 hits per hari atau 6.240.000 hits per bulan dengan 32.000 pengguna. Pada bulan Juni 1999, meningkat lagi menjadi 536.000 hits per hari dengan pengguna mencapai 40.000.

Sedangkan berdasarkan jumlah halaman yang diakses (*page view*), pada bulan September 2019, mencapai 167,41 juta kunjungan dengan 54,79% pengguna mengakses langsung situs detik.com dan 3,26% berasal dari sumber lain yang terhubung ke detik.com (sumber: www.similarweb.com). Dan saat ini, berdasarkan data yang diperoleh dari situs Alexa.com, detik.com berada pada posisi nomor satu sebagai portal media online yang paling sering dikunjungi pada tahun 2018.

Perjalanan detik.com menjadikan internet sebagai basis pemberitaan. Pada masa Orde Baru, detik.com muncul dalam format sebagai majalah mingguan yang mengupas masalah politik sebagai pokok pembahasan. Namun kekuatan Orde Baru yang sangat ketat mengawasi pemberitaan di media massa, memaksa majalah tersebut menyudahi kiprahnya untuk terbit dalam format majalah. Hal ini karena detik.com dianggap terlalu keras dalam pemberitaannya, yang dianggap menyerang penguasa. Oleh sebab itu, dengan keputusan Menteri Penerangan saat itu, majalah detik.com bersama Tempo dan Forum harus dicabut Surat Ijin Usaha Penerbitan yang merupakan surat ijin usaha media massa.

Seiring dengan perkembangannya sebagai media online, maka pada tanggal 3 Agustus 2011, CT Corp mengakuisisi detik.com. Dengan demikian, secara resmi, detik.com berada di bawah Trans Corp dengan Chairul Tanjung sebagai pemilik utamanya CT Corp dengan nilai US\$60 juta atau senilai Rp. 521 – 540 miliar. Setelah diambil alih oleh CT Corp, maka selanjutnya jajaran direksi diisi oleh pihak dari Trans Corp, yang merupakan

perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. Sebagai Komisaris Utama adalah Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia. Untuk diketahui, sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham detik.com dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di detik.com, 39% oleh Tiger dan Mitsui 2%.

1.2 Visi dan Misi Detik.com

a. Visi Detik.com

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/mobile.

b. Misi Detik.com

1. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier.
3. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

1.3 Nilai Detik.com

- a. Cepat dan akurat
- b. Kreatif dan inovatif
- c. Kerjasama

- d. Independen

1.4 Struktur Organisasi dan Struktur Redaksional

- a. Struktur Organisasi

1. Presiden Direktur
2. Wakil Presiden Direktur/Pemimpin Redaksi
3. Direktur Operasional
4. Direktur Informasi Teknologi
5. Direktur Keuangan

- b. Struktur Redaksional

1. Pemimpin Redaksi
2. Wakil Pemimpin Redaksi
3. Redaktur Pelaksana
4. Coordinator Liputan
5. Reporter

1.5 Situs dalam Detik.com

Dalam situs www.detik.com, terdapat beberapa kategori yang digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis berita yang ada, yaitu:

- a. detikNews
- b. detikFinance
- c. detikFood
- d. detikHot

- e. detiki-Net
- f. detikSport
- g. detikHealth
- h. 20detik
- i. detikFoto
- j. detikOto
- k. detikTravel
- l. detikEvent
- m. detikForum
- n. blogDetik
- o. Wolipop
- p. Indeks
- q. Iklan Baris
- r. Pasang Mata

2. Gambaran Umum Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

2.1 Profil Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

2.1.1 Letak Geografis

Kecamatan Tambaksari termasuk wilayah Geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Timur dengan ketinggian lebih kurang 4 meter di atas permukaan air laut.

2.1.2 Batas Wilayah

Kecamatan Tambaksari ini berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Kenjeran dan Bulak, sebelah Timur dengan Kecamatan Mulyorejo, sebelah Selatan dengan Kecamatan Gubeng, sebelah Barat dengan Kecamatan Simokerto dan Genteng.

2.1.3 Luas Wilayah

Luas Wilayah seluruh Kecamatan Tambaksari adalah lebih kurang 9,10 km² yang terbagi menjadi 8 (delapan) kelurahan antara lain Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Tambak Sari, Rangkah, Gading, Kapas Madya Baru, Dukuh Setro. Kecamatan Tambaksari ini terdapat beberapa jumlah RW dan RT sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Jumlah RT dan RW Kecamatan Tambaksari

Kelurahan	RT	RW
Pacar Keling	78	12
Pacar Kembang	112	11
Ploso	97	11
Tambak Sari	77	9
Rangkah	50	9
Gading	95	11
Kapas Madya Baru	92	8
Dukuh Setro	64	7
Jumlah	665	78
Tahun 2017	665	78
Tahun 2016	665	78
Tahun 2015	665	78

Sumber: surabayakota.bps.go.id

2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

2.2.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Tabel berikut adalah jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya per Kelurahan.

Tabel 2.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
Pacar Keling	0,70	23.763	33.947,14
Pacar Kembang	2,09	41.248	19.735,88
Ploso	1,49	35.918	24.106,04
Tambaksari	0,63	20.696	32.850,79
Rangkah	0,70	18.408	26.297,14
Gading	0,79	30.833	39.029,11
Kapas Madya Baru	1,58	41.596	26.326,58
Dukuh Setro	1,12	22.011	19.652,67
Jumlah	9,10	234.473	25.766,26
Tahun 2017	9,10	233.636	25.674,29
Tahun 2016	9,10	233.160	24.609,34
Tahun 2015	9,10	223.946	24.609,34

Sumber: surabayakota.bps.go.id

2.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pacar Keling	11.534	12.229	23.763
Pacar Kembang	20.531	20.717	41.248
Ploso	17.898	18.020	35.918
Tambaksari	10.200	10.496	20.696
Rangkah	9.061	9.347	18.408
Gading	15.307	15.526	30.833
Kapas Madya Baru	20.959	20.637	41.596
Dukuh Setro	11.020	10.991	22.011
Jumlah	116.510	117.963	234.473
Tahun 2017	116.310	117.326	233.636
Tahun 2016	116.076	117.084	233.160
Tahun 2015	111.820	112.125	223.946

Sumber: surabayakota.bps.go.id

3. Kronologi Kerusuhan Papua di Malang dan Surabaya

Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, terjadi bentrok yang melibatkan sejumlah mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan dan demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah Papua dan Papua Barat. Bermula dari demo sejumlah mahasiswa Papua di depan balai kota Malang dalam rangka memperingati 57 tahun Perjanjian New York dengan tema “Amerika Serikat Harus Bertanggung Jawab Atas Penjajahan di West Papua”. Demo tersebut tidak mempunyai ijin hingga kemudian terjadi bentrok dengan warga. Tidak dikeluarkannya ijin dari pihak

kepolisian disebabkan oleh poin dari aspirasi yang akan disampaikan termasuk melanggar konstitusi.

Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi mengenai bentrok tersebut kemudian menerjunkan anggotanya untuk bersiaga di sejumlah titik. Namun hal ini menyebabkan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut semakin bertindak anarkis, merusak beberapa fasilitas umum, melempari warga dengan batu hingga memblokade jalan. Aksi anarkis ini kemudian menyebabkan jatuhnya korban yaitu terdapat warga yang terluka akibat terkena lemparan batu. Dengan adanya bentrok ini, pihak kepolisian resor (polres) Malang memberikan seruan dan himbauan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengkaji kembali pemberian beasiswa kepada warganya yang berkuliah di Malang dan menyebutkan bahwa mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Malang menyuarakan kemerdekaan Papua (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4667795/rencana-demo-mahasiswa-papua-di-malang-berujung-anarkis?_ga=2.29143034.774727794.1567934149-988294525.1548239616 diakses tanggal 10 September 13:41 WIB).

Keesokan harinya, muncul kabar adanya kembali bentrok antara warga dengan mahasiswa Papua di Surabaya. Hal ini diawali dari beredarnya foto bendera merah putih yang masuk ke dalam selokan dan tiang bendera yang rusak di beberapa bagian. Karena mengetahui foto ini, sejumlah organisasi masyarakat mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Massa saling lempar batu dan mencoba masuk ke asrama namun berhasil dicegah oleh pihak aparat kepolisian.

Kemudian aparat mengeluarkan ultimatum kepada mahasiswa penghuni asrama tersebut untuk keluar namun tidak diindahkan. Hal tersebut menyebabkan pada akhirnya aparat mengeluarkan gas air mata ke arah asrama hingga 20 kali tembakan dan aparat kemudian berhasil membawa 43 orang mahasiswa untuk dimintai keterangan. Akibat dari bentrok mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya tersebut memicu kerusuhan lain di beberapa daerah di Papua. Sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama di Jalan Yos Sudarso, diblokade massa hingga macet total. Warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya hingga menyebabkan aktivitas warga dan lalu lintas lumpuh. Kerusuhan semakin melebar hingga ke Sorong, Papua. Massa merusak Bandara Domine Eduard Osok, Sorong dan membakar sebagian barang di bandara. Disebutkan bahwa aksi lanjutan ini terjadi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Papua terhadap insiden pengepungan mahasiswa Papua di Surabaya dan agar pemerintah cepat menyelesaikan permasalahan tersebut.

4. Pemberitaan Detik.com tentang Penanganan Kerusuhan Papua

Sebagai portal berita online yang sering dikunjungi menurut situs Alexa.com, Detik.com terlihat memberitakan kerusuhan Papua ini dengan jumlah berita yang cukup banyak yaitu sebanyak 654 berita. Salah satu topik yang diangkat dalam pemberitaannya adalah mengenai penanganan kerusuhan Papua. Dari artikel dalam situs detik.com diperoleh bahwa beberapa langkah dilakukan untuk meredakan atau menyelesaikan konflik tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sempat melakukan pelambatan akses internet di beberapa wilayah Papua untuk mencegah hoaks yang beredar. Pelambatan tersebut dilakukan secara bertahap (<https://news.detik.com/berita/d-4672323/cegah-hoax-kominfo-sempt-lambatkan-internet-di-papua> diakses tanggal 11 September 2019 pukul 10:34 WIB). Kominfo mendeteksi 2 hoaks terkait aksi massa yang terjadi yaitu foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan Polres Surabaya yang menculik 2 pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Namun kemudian, setelah kondisi di Manokwari dan Sorong dinyatakan kondusif, kembali terjadi kerusuhan di Fakfak, Papua Barat dan Timika, Papua. Hal tersebut menyebabkan Kominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran layanan data yang bertujuan agar mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertibandi Papua dan sekitarnya (<https://news.detik.com/berita/d-4675574/kominfo-blokir-sementara-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat> diakses tanggal 11 September 2019 pukul 10:44 WIB).

Menurut Kabag Penum Dividi Humas Polri, pemblokiran tersebut berkaitan dengan jaminan keamanan untuk mencegah penyebaran hoaks dan hasutan di media sosial. Divisi Humas Polri juga menyatakan bahwa pemblokiran merupakan hasil koordinasi antara penegak hukum dan kementerian bukan merupakan permintaan dari polisi (<https://news.detik.com/berita/d-4676613/layanan-data-di-papua-papua-barat-diblokir-polri-cegah-hasutan-hoax> diakses tanggal 8 September 2019 pukul 09:09 WIB). Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan tindakan yang diambil oleh Kominfo tersebut karena

dianggap melanggar hak atas informasi di UUD 195. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua dan semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua. Oleh sebab itu, KontraS memandang pembatasan akses informasi jauh dari penyelesaian yang tepat (<https://news.detik.com/berita/4676746/kontras-anggap-pelambatan-internet-di-papua-papua-barat-diskriminatif> diakses tanggal 08 September 2019 pukul 11:55 WIB).

Selain penolakan yang disampaikan oleh KontraS tersebut, puluhan mahasiswa Sorong juga melakukan protes atas pembatasan internet tersebut. Mahasiswa menyatakan bahwa kondisi sudah kondusif namun internet belum diaktifkan kembali. Dan jika tidak segera diaktifkan maka mahasiswa akan melakukan aksi yang lebih besar (<https://news.detik.com/berita/d-4692550/puluhan-mahasiswa-di-sorong-protes-pembatasan-jaringan-internet> diakses tanggal 11 September 2019 pukul 14:55 WIB). Akibat pembatasan akses internet ini, Menteri Komunikasi dan Informatika dipanggil oleh Ombudsman RI.

Ketua Ombudsman RI menyebutkan bahwa pemberlakuan pembatasan media sosial di Papua dan Papua Barat mengakibatkan adanya kerugian besar karena masyarakat banyak yang menggunakan akses internet terutama media pesan singkat Whatsapp dalam bisnisnya. Disampaikan sebelumnya bahwa pembatasan ini akan dicabut setelah situasi di Papua dan sekitarnya kembali normal. Namun, hingga pemanggilan Ombudsman, pencabutan pembatalan masih belum dilakukan karena menunggu koordinasi dari Menkominfo. Sedangkan Kapolri menyatakan, layanan

akses internet masih dibatasi karena oknum-oknum yang menyebarkan kabar bohong atau hoaks masih banyak (<https://news.detik.com/berita/d-4683925/internet-di-papua-dibatasi-kapolri-masih-ada-penyebaran-hoax> diakses tanggal 11 September 2019 pukul 09:09 WIB).

Gambar 2.1

Internet di Papua Dibatasi, Kapolri: Masih Ada Penyebaran Hoax



(Sumber: detik.com)

Penanganan kerusuhan yang dilakukan dari pihak pemerintah, melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pendekatan kesejahteraan program pembangunan (<https://news.detik.com/berita/d-4676920/redakan-situasi-di-papua-ini-strategi-pemerintah> diakses tanggal 15 September 2019 pukul 10:11 WIB). Sedangkan dari aspek keamanan, dilakukan oleh pihak aparat kepolisian yaitu dengan mengambil tindakan berupa pengiriman beberapa personel ke Papua. Sesuai perkiraan dari

intelejen sebanyak 1.200 personel atau 12 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polda-polda terdekat seperti Sulsel, Sulteng, Maluku, NTB dan Kalimantan Timur diberangkatkan ke Papua. Personel tambahan ditempatkan di wilayah Manokwari dan Sorong (<https://news.detik.com/berita/d-4674639/polri-kirim-pasukan-tambahan-ke-papua-barat> diakses tanggal 17 September 2019 pukul 12:22 WIB).

Pada tanggal 30 Agustus 2019, juga diberitakan bahwa Polda Sumatera Barat memberangkatkan 250 personel yang berasal dari Satbrimob ke Papua untuk mendukung dan membantu pengamanan Papua di tengah gejolak. Langkah tersebut juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang mengirimkan 200 personel pasukan Brimob ke Papua. Hal tersebut dilakukan untuk membantu proses pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat seusai kerusuhan. Pengiriman pasukan Brimob juga dilakukan oleh Polda Jambi yaitu sebanyak 250 personel Brimob, Polda Bengkulu 250 personel (<https://news.detik.com/berita/d-4687185/250-personel-brimob-dari-jambi-diberangkatkan-ke-papua> diakses tanggal 19 September 2019 pukul 15:01 WIB).

Gambar 2.2

Polda Sumbar Berangkatkan 250 Brimob Bantu Pengamanan Papua



(Sumber: detik.com)

Moeldoko menyampaikan bahwa penambahan pasukan tersebut agar situasi terjaga dengan baik dan memberikan rasa tenang sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan semuanya. Polisi menjamin tidak menggunakan peluru tajam dalam melakukan pengamanan namun akan mengedepankan langkah persuasif (<https://news.detik.com/berita/d-4677971/istana-penambahan-pasukan-di-papua-barat-beri-rasa-tenang-bukan-menekan> diakses tanggal 20 September 2019 pukul 18:08 WIB). Namun, beberapa tokoh lintas agama di Papua meminta agar Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menarik personel aparat dari Papua karena kehadiran aparat membawa trauma masa kelam bagi masyarakat Papua. Menurut tokoh agama tersebut, penjagaan yang disebutkan Kapolri dan Panglima harus mulai dengan bertanya kepada pimpinan

masyarakat tentang bagaimana keadaan masyarakat bukan dengan penjagaan yang terlalu lama.

Gambar 2.3

Tokoh Agama Papua Minta Aparat Ditarik, Kapolri Penuhi Jika Sudah Aman



(Sumber: detik.com)

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa setiap kasus mempunyai karakteristik sesuai panca gatra dan trigatra tentang tempat, rakyat dan posisi geografis. Oleh sebab itu, menurutnya, penyelesaian kasus Papua yang paling baik adalah dengan langkah persuasif yaitu dengan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah, menghindari rasistis, musyawarah dengan para tokoh. Pemerintah diminta untuk tidak mudah terpancing sehingga akan menimbulkan kemarahan baru (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4684567/mahfud-md-bicara-soal-konflik-papua-harus-persuasif-jangan-represif> diakses tanggal 20 September 2019 pukul 19:11 WIB).

Sejalan dengan Mahfud MD, tokoh Papua, Franz Magnis-Suseno dan cendekiawan Muslim, Quraish Shihab, mengimbau penyelesaian masalah di Papua tidak dilakukan dengan pendekatan senjata karena akan menambah kebuntuan, kematian sehingga akan menghambat masyarakat Papua. Penyelesaian dapat dilakukan melalui dialog terbuka dengan berbagai pihak serta mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih terbuka dalam rangka perdamaian bangsa. Selain itu, Quraish Shihab memandang perlunya saling terbuka dan harus saling memaafkan satu sama lain (<https://news.detik.com/berita/d-4678569/romo-magnis-quraish-shihab-ingin-persoalan-papua-diselesaikan-lewat-dialog> diakses tanggal 21 September 2019 pukul 20:05 WIB).

Sebelumnya, pihak kepolisian selaku aparaturnegara yang bertugas dalam menjaga keamanan, mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas oknum pelaku kerusuhan (<https://news.detik.com/berita/d-4677365/jokowi-minta-tindak-tegas-pelaku-diskriminasi-ras-polri-kami-akan-profesional> diakses tanggal 22 September 2019 pukul 00:05 WIB). Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, juga meminta kepolisian dan TNI bergerak cepat mengatasi kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua. Kepolisian dan TNI didesak untuk segera melakukan pemulihan dengan waktu sesingkat-singkatnya serta meminta Komisi I DPR RI untuk mengkaji peristiwa yang mungkin memunculkan gerakan separatis atau gerakan bersenjata (<https://news.detik.com/berita/d-4685484/bamsoet-minta-komisi-i-dpr-bersama-tni-polri-bahas-solusi-persoalan-papua?single=1> diakses tanggal 22 September 2019 pukul 00:33 WIB).

Kapolri menegaskan bahwa akan menyelidiki secara professional. Jika warga sipil yang melakukan diskriminasi ras yang berakibat adanya kerusuhan yang panjang tersebut, maka kepolisian akan menindak tegas sesuai Undang-Undang yang mengatur penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Untuk itu, Polisi melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Dari hasil tersebut, polisi menetapkan tersangka yang melakukan ujaran rasialisme berdasarkan bukti video yang diperoleh, yang menunjukkan salah seorang dalam video menyebutkan kata-kata kurang sopan, kata-kata binatang rasis (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4686824/polisi-tetapkan-satu-lagi-tersangka-rasialisme-di-asrama-mahasiswa-papua> diakses tanggal 23 September 2019 pukul 14:22 WIB).

Melalui pemberitaan yang ditulis oleh detik.com diperoleh informasi bahwa polisi melakukan penangkapan atas seseorang yang bertugas sebagai admin akun Twitter @AgusMatta2 yang membuat pernyataan yang mengandung ujaran kebencian. Admin melalui akunnya menuliskan sebuah kalimat *“usir semua mahasiswa N Pemuda monyet Papua kembali Papua. Setelah itu NKRI Siap tenggelam hancurkan”*. Pemilik akun diketahui berada di Sulawesi Selatan. Atas tulisannya di Twitter tersebut, pelaku ditangkap dan dikenakan pasal UU ITE tentang ujaran kebencian dan rasis.

Penanganan yang dilakukan terkait kasus insiden yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, polisi bekerja sama dengan Interpol untuk melacak Veronica Koman yaitu pelaku yang diduga melakukan provokasi dan penyebaran berita hoaks (<https://news.detik.com/berita/d-4693820/polisi-gandeng-interpol-kejar-veronica-koman-tersangka-provokasi?single=1> diakses tanggal 23

September 2019 pukul 15:33 WIB). Tim penyidik Polda Jawa Timur melakukan gelar perkara dengan memeriksa 3 orang saksi, 3 orang saksi ahli dan mengumpulkan bukti-bukti terkait.

Dari artikel berita detik.com tersebut, diketahui bahwa tersangka pelaku provokasi, dalam akun Twitternya, membuat narasi yang menyebutkan ada korban pemuda Papua yang terbunuh, tertembak dan konten-konten yang bersifat provokatif lainnya. Tersangka terlihat aktif menyebarkan informasi di akun Twitter-nya sejak 17 Agustus 2019 yaitu saat insiden di asrama mahasiswa Papua terjadi. Tulisan yang dibuat oleh tersangka kesemuanya dalam Bahasa Inggris.

Untuk itu, polisi bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. Polisi berkoordinasi untuk memastikan keberadaan tersangka, yang diketahui sedang menempuh pendidikan di luar Indonesia dan suami diketahui merupakan warga negara Australia. Selanjutnya, polisi meminta bantuan Dirjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan dan pencabutan paspor tersangka. Pencekalan dan pencabutan paspor tersangka mendapat respon tidak baik dari aktivis karena akan mengakibatkan seseorang mengalami *statelessness* sehingga termasuk melanggar hak asasi manusia. Namun, Polri menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena Polri menempuh jalur Interpol mengingat tersangka berada di luar negeri. Polisi dapat mengajukan *red notice* kepada Interpol (<https://news.detik.com/berita/d-4698043/soal-cabut-paspor-veronica-koman-polri-kami-fokus-mekanisme-interpol?single=1> diakses tanggal 24 September 2019 pukul 09:55 WIB).

Untuk mengungkap kasus kerusuhan yang berujung anarkis di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat, Kapolri juga diminta oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha untuk mengungkap kelompok jaringan internasional (<https://news.detik.com/berita/d-4689729/komisi-i-minta-polri-ungkap-jaringan-internasional-terlibat-rusuh-papua?single=1> diakses tanggal 25 September 2019 pukul 09:11 WIB). Disampaikan oleh Satya bahwa perlu segera dibuka apakah berkaitan dengan gerakan Benny Wenda yang selama ini ingin pisah dari Indonesia atau jaringan lain. Jika hal tersebut dapat diungkap maka akan diketahui apakah ada kaitannya dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kapolri menyebutkan sebelumnya bahwa hasil intelijen menunjukkan adanya keterlibatan pihak asing dalam serangkaian kerusuhan Papua.

Kapolri menurunkan tim dari Mabes Polri, propam bekerja sama dengan Komnas HAM agar memperoleh keterangan yang benar tentang peristiwa yang terjadi. Kapolri menyebutkan actor local ULMWPP (*United Liberation Movement for West Papua*) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah dalang kerusuhan Papua yang juga mempengaruhi gerakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Kapolri juga menyebutkan bahwa actor dari luar yang terlibat adalah Benny Wenda yang ingin memanfaatkan moment kerusuhan di Papua.

Dalam artikel berita detik.com selanjutnya, disampaikan bahwa polisi terus memetakan jaringan tokoh separatis Papua yaitu Benny Wenda yang diduga melakukan provokasi tersebar hingga Eropa dan Afrika. Provokasi dilakukan dengan menyebarkan konten-konten baik narasi foto, video ke beberapa jaringan atau koneksi yang dimilikinya di Eropa, kawasan Asia Pasifik maupun sebagian

Afrik7 (<https://news.detik.com/berita/d-4693645/polri-benny-wenda-sebar-provokasi-terkait-rusuh-papua-ke-eropa-afrika> diakses tanggal 25 September 2019 pukul 21:05 WIB). Polisi menyebutkan, Benny Wenda aktif memprovokasi dan agitasi di media sosial, menyebarkan berita hoaks terkait Papua ke dunia internasional yang mengesankan bahwa Papua tidak diperhatikan oleh negara Indonesia (<https://news.detik.com/berita/d-4691198/polri-jelaskan-peran-benny-wenda-dalam-rusuh-papua?single=1> diakses tanggal 25 September 2019 pukul 19:00 WIB).

Untuk kasus demo di beberapa daerah di Papua, polisi menetapkan 30 tersangka yang merusak dan membakar bangunan serta menjarah toko. Seperti diketahui, massa membuat kerusuhan berdemonstrasi menuntut proses hukum terhadap pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Massa berkumpul di sejumlah titik melakukan tindakan anarkis. Atas kejadian tersebut, tersangka dikenakan pasal berlapis sesuai dengan Ketentuan Umum Hukum Pidana yang berlaku (<https://news.detik.com/berita/d-4687932/polisi-tetapkan-30-orang-tersebut-kerusuhan-di-jayapura> diakses tanggal 26 September 2019 pukul 08:22 WIB).

Sebagai langkah lanjutan, agar ricuh di Papua tidak terulang kembali, Kapolri berkoordinasi dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial dan Gubernur setempat. Kapolri membentuk tim khusus TNI-Polri untuk mencegah pihak yang ingin rusuh. Kapolri mengeluarkan maklumat kepada Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua untuk melarang adanya demo dan mengungkapkan ada hal-hal yang harus diperhatikan jika ingin berunjuk rasa. Hal tersebut adalah tidak boleh mengganggu

ketertiban publik, tidak mengganggu hak asasi orang lain, harus mengindahkan etika dan moral serta memelihara persatuan kesatuan bangsa. Selain itu, Kapolri juga melakukan langkah rekonsiliasi dengan paguyuban yang ada di Papua serta mengupayakan dialog dengan tokoh-tokoh adat dan warga asli Papua.